



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT TRANSPARANSI PENERIMAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF

Gedung Kementerian Negara BUMN, Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13
Jakarta 10110 - Indonesia
(T): +62-21-34832642 - (F): +62-21-34832645

SIARAN PERS

INDONESIA RAIH STATUS EITI COMPLIANT

***DIAKUI TELAH MENERAPKAN AZAS TRANSPARANSI PENERIMAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF
SECARA KOMPREHENSIF***

Jakarta, 17 Oktober 2014 – Indonesia ditetapkan sebagai Negara dengan status *EITI Compliant* (taat azas transparansi penerimaan industri ekstraktif) dalam Sidang Tahunan Dewan Internasional EITI (*EITI International Board*) yang dilangsungkan di Naypyidaw, Myanmar, 15 Oktober 2014. Penetapan Indonesia sebagai *EITI Compliant Country* tersebut telah melalui tahapan validasi, yang dilakukan secara independen oleh pihak ketiga, dan penilaian atas penerapan kegiatan transparansi oleh Dewan Internasional EITI. Proses validasi dan penilaian atas kegiatan EITI Indonesia telah berlangsung sejak bulan Mei 2013. Sebagai negara dengan status *EITI Compliant Country*, setiap Warga Negara Indonesia dapat mengakses informasi yang mendalam tentang manajemen sumber daya alam, termasuk rekonsiliasi Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif maupun Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

“Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Keterlibatan Indonesia dalam Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif adalah bagian dari Program Tata Kelola Pemerintahan dan upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab,” ujar Dr. Montty Girianna, Deputi Menko Perekonomian bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pemerintah Republik Indonesia sebelumnya telah mengumumkan data rekonsiliasi penerimaan Negara yang didapat dari industri minyak dan gas bumi, mineral serta batubara untuk tahun kalender 2009-2011 dalam dua Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia. Laporan pertama EITI Indonesia yang mencakup tahun kalender 2009 diterbitkan pada Mei 2013, sementara Laporan Kedua EITI Indonesia yang mencakup tahun kalender 2010 dan 2011 telah diterbitkan pada bulan Mei 2014. Laporan EITI Indonesia tersebut menunjukkan hasil rekonsiliasi antara laporan penerimaan Negara dari pemerintah dengan laporan pembayaran dari masing-masing pelaku usaha dan diterbitkan secara berkala dalam rangka mencapai sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.



“Penetapan Indonesia sebagai negara yang taat azas EITI adalah keistimewaan dan bukti bahwa dengan kerja keras dan kemauan yang kuat, reformasi pemerintahan dan birokrasi telah mengubah Indonesia menjadi negara yang memiliki sistem pemerintahan yang bertanggungjawab, transparan dan stabil. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada mitra kerja kami di Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kemendagri, BPKP, Lembaga Negara terkait lainnya, Kelompok Masyarakat Sipil, serta Pelaku Usaha Industri Ekstraktif yang telah mewujudkan sistem transparansi yang diakui ini,” lanjut Dr. Girianna.

Dalam siaran persnya, Dewan EITI Internasional mengucapkan selamat kepada Pemerintah Indonesia atas komitmen yang berkelanjutan dan kepemimpinannya dalam penerapan proses EITI.

“Dengan dicapainya status compliance, Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa sebuah negara dengan sektor sumber daya alam yang besar dan amat kompleks dapat menerapkan azas transparansi atas penerimaan sumber dayanya. Apa yang telah diraih EITI Indonesia bukan upaya yang sepele. Saya berharap untuk dapat terus melihat bagaimana Indonesia menerapkan EITI sebagai bagian dari proses transparansi dalam sistem tata kelola pemerintahan dan untuk memastikan bahwa sumber daya alam memberikan maslahat yang besar bagi warga negaranya,” tutur Clare Short, Ketua Dewan EITI Internasional.

Dengan demikian, Indonesia menjadi anggota ASEAN pertama yang mempublikasikan data penerimaan melalui laporan EITI dan ditetapkan sebagai *EITI Compliant Country*. Laporan ini mencakup seluruh penerimaan Negara, termasuk dari pajak dan pendapatan non-pajak, yang diterima pemerintah dari pelaku usaha industri ekstraktif (minyak dan gas bumi, mineral serta batubara), serta memberikan informasi rinci Dana Bagi Hasil yang terpilah hingga pada level yang mendetil.

Indonesia menjadi Negara Pelaksana EITI pada tahun 2010, ketika pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif.(*)

Untuk informasi lebih lanjut, mohon menghubungi:

Fajar Reksoprodjo

Sekretariat EITI Indonesia

Email : freksoprodjo@eiti.ekon.go.id

CATATAN EDITORIAL:

1. Laporan EITI Indonesia diunduh di tautan berikut: [Laporan EITI Pertama \(2009\)](#) dan [Laporan EITI Kedua \(2010-2011\)](#).
2. Prakarsa Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif (*Extractive Industries Transparency Initiative/EITI*) bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif. EITI menetapkan standar internasional bagi



pelaku usaha untuk melaporkan pembayaran yang dilakukan dan bagi pemerintah untuk membuka angka penerimaan Negara.

3. EITI adalah sebuah koalisi antara Pemerintah, Pelaku Usaha, Kelompok Masyarakat Sipil, Penanam Modal dan Organisasi Internasional. Perwakilan-perwakilan lembaga tersebut duduk di dalam satu Dewan Internasional (*EITI International Board*).
4. Di Indonesia, berdasarkan peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010, pelaksanaan EITI berada dibawah tanggung jawab Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang memimpin Tim Pengarah Transparansi dan dijalankan oleh sebuah Tim Pelaksana Transparansi yang terdiri dari perwakilan unsur pemerintah, masyarakat sipil dan industri, dan diketuai oleh Deputi Menteri Koordinator bidang Perekonomian.
5. Sekretariat EITI Indonesia merupakan suatu lembaga dibawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang diketuai oleh Asisten Deputi III Menko Perekonomian untuk melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan transparansi penerimaan industri ekstraktif.
6. Standar EITI diterapkan di 48 negara dimana 31 diantaranya (termasuk Indonesia) telah ditetapkan sebagai Negara yang taat azas EITI dan 17 lainnya berada dalam status kandidat.
7. Laporan-laporan EITI, Siaran Pers, data serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan EITI dapat dilihat di:
 - a. Situs EITI Indonesia: <http://eiti.ekon.go.id/>
 - b. Situs EITI International: <http://www.eiti.org/>